

PEMODELAN PENYULUHAN PERIKANAN PADA MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF

Fishery Extension Model Development for Coastal Community through Participatory Approach

Siti Amanah¹⁾

Anna Fatchiya²⁾, Dewi Syahidah²⁾

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.506 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km, luas laut sekitar 5,8 juta km² dan 40 persen penduduknya bertempat tinggal di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir khususnya nelayan memiliki kebergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya ikan. Keterbelakangan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh nelayan *kecil* yang umumnya hanya memiliki armada perahu tanpa motor, dan paling tinggi motor tempel. Selain masalah keterbelakangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan perikanan yang berpusat pada manusia.

Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Bali Utara dengan lokasi kasus Desa Pemuteran dan Anturan dengan partisipan sejumlah 41 orang terdiri atas nelayan, perempuan nelayan, petambak, dan penyuluh. Penelitian dilakukan tiga tahap yaitu tahap pertama adalah pengenalan aspek spesifik masyarakat, dan pemetaan kondisi umum subyek penelitian; tahap kedua dilakukan penggalan masalah dan penentuan prioritas masalah yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), diskusi kelompok terfokus, teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA), merancang model penyuluhan yang dikehendaki masyarakat, dan sosialisasi model pada sejumlah partisipan penelitian; dan pada tahap ketiga dilakukan perbaikan model sesuai dengan perkembangan masyarakat pesisir. Teori perilaku, pendekatan penyuluhan partisipatori, pendekatan pelatihan berbasis kesenjangan kompetensi, dan konsep tentang pembangunan wilayah lokal digunakan untuk menganalisis hasil RRA dan PRA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di dua desa kajian memiliki karakteristik yang berbeda ditinjau dari kondisi wilayah, keadaan sosial ekonomi masyarakatnya, kegiatan usaha perikanan yang dilakukan, kelembagaan, kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan, dan kebutuhan spesifik akan program penyuluhan. Nelayan di Desa Anturan memiliki mobilitas sosial vertikal yang lebih baik dibandingkan dengan nelayan di Desa Pemuteran. Di sisi lain, masyarakat Desa Pemuteran lebih multikultur, dan diversifikasi usaha di bidang perikanan lebih beragam. Permasalahan umum di dua desa pesisir tersebut adalah keterbatasan modal, teknologi, dan armada penangkapan; belum dimilikinya kesungguhan untuk melakukan pengolahan hasil tangkapan; keterbatasan modal untuk melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha; kesulitan memasarkan hasil perikanan bagi nelayan tangkap; dan minimnya kapasitas masyarakat pesisir untuk merehabilitasi terumbu karang.

¹⁾Ketua Peneliti (Staf Pengajar Departemen SEI, FPIK-IPB); ²⁾Anggota Peneliti

Melalui penelitian dapat dirumuskan dua model penyuluhan alternatif yang relevan dengan situasi di desa pesisir. Model pertama adalah pendekatan penyuluhan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan perencanaan, adanya stimulasi pembangunan wilayah lokal, dan penguatan sosial ekonomi masyarakat. Model kedua adalah model memotivasi masyarakat, yang intinya meningkatkan kemauan masyarakat pesisir untuk lebih kreatif dan ulet dalam mendayagunakan sumber daya ikan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Indikator dan tolok ukur keberhasilan model tersebut didasarkan pada derajat perubahan yang terjadi di bidang perilaku penangkapan dan budidaya, perbaikan bidang pengelolaan usaha, perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pola bermasyarakat, dan perbaikan lingkungan. Model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat diterapkan di daerah lain yang memiliki kondisi serupa.

Peran penyuluh sebagai fasilitator perubahan sangat diperlukan. Kajian tentang penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swadaya maupun petugas penyuluh (pegawai pemerintah), serta respon masyarakat atas berbagai kegiatan penyuluhan di lokasi kajian, telah menghasilkan sebuah modul dengan judul: "Peningkatan Kompetensi Penyuluh dalam Memfasilitasi Komunitas Pesisir." Modul tersebut dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pemerintah, petugas penyuluh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak yang berminat membangun, dan mengembangkan masyarakat pesisir ke arah yang berkualitas.